



2024



RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Jl. Brigjend Katamso No. 9
Palangka Raya - Kalimantan Tengah



dpmd.kalteng.go.id



(0536) - 3221585



dpmdes.provkalteng@gmail.com



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/298/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
- d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

Kata Pengantar

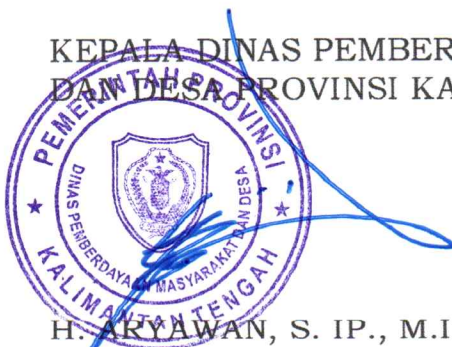
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya memungkinkan selesainya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai dokumen perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perubahan serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Palangka Raya, Juli 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



H. ARYAWAN, S. IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	25
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	33
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
Rencana Kerja dan Pendanaan	34
 BAB V PENUTUP	
Penutup	46

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 ...	6
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	14
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	16
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	26
4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai Tupoksinya.

Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin dipedesaan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu kepada Program Nasional dan Program Daerah.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta menyelaraskan antara rancangan program dengan kegiatan diperlukan suatu acuan Rencana Kerja (RENJA). Untuk mendorong agar pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan yang baik (Good Service) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan upaya efektif Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang lebih terfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya berfungsi sebagai dokumen Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana kerja sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat";
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

- (1) Merumuskan arah Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kalimantan Tengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Merupakan rujukan arah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun;
- (3) Merupakan rujukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja, Sistematika Penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

Berisikan uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan uraian tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Tahun 2023 dari dana DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran sebesar Rp. 39.152.026.026,- yang telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 36.464.340.217,- atau 93,14% sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100 %. Realisasi anggaran yang belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut: 1) terdapatnya sisa dana untuk pembayaran gaji pegawai yang cukup besar nilainya, 2) terdapat sisa pembayaran gaji tenaga kontrak/PPNPN, 3) terdapat sisa dana yang tidak bisa digunakan lagi. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perencanaan Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 = 5+7+9	11=(10/4)*100
02							URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)									
02	13						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
02	13	01					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
02	13	01	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
02	13	01	1	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
02	13	01	1	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	20	10	20	20	100	20	50	250
02	13	01	1	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	0	100	20	20	100	0	120	0

0 2	13	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40	0	0	0	0	40	40	100
0 2	13	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40	0	0	0	0	40	40	100
0 2	13	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Lakip	25	10	10	10	100	25	45	180
0 2	13	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
0 2	13	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	46	0	46	46	100	46	92	200
	13	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2.500	0	0	0		2.500	2500	100
0 2	13	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	5	30	40	40	100	5	75	1.500
0 2	13	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	10	40	40	40	100	10	90	900
0 2	13	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
0 2	13	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	10	0	0	0	0	10	10	100
0 2	13	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah polis asuransi	1	1	1	1	100	1	3	300
0 2	13	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	28	10	20	20	100	28	58	207

02	13	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
02	13	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas kantor	0	0	80	80	100	0	80	0
02	13	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10	0	0	0	0	10	10	100
02	13	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	5	0	0	0	0	5	5	100
02	13	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta	0	0	100	100	100	0	100	0
02	13	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	20	2	2	2	100	20	24	120
02	13	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
02	13	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik	10	15	15	15	100	10	40	400
02	13	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	0	10	10	100	6	16	267
02	13	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah buku dan fotocopy	200	26.000	26.000	26.000	100	200	52200	26.100
02	13	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	3	3	3	100	1	7	700
02	13	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	60	12	30	30	100	60	102	170

02	13	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diselenggarakan	80	99	90	90	100	80	269	336
02	13	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
02	13	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	0	0	1	1	100	0	1	0
02	13	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	7	0	0	0	0	7	7	100
02	13	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
02	13	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.400	1.400	1.400	1.400	100	1.400	4200	300
02	13	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran	12	5	5	5	100	12	22	183
02	13	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	12	12	12	100	1	25	2.500
02	13	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
02	13	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	26	25	25	25	100	26	76	292
02	13	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20	9	9	9	100	20	38	190

02	13	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	1	0	100	100	100	1	101	10.100
02	13	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	24	12	24	24	100	24	60	250
02	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA									
02	13	03	1	01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi									
02	13	03	1	01	02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0
02	13	03	1	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi	6	0	30	30	100	6	36	600
02	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
02	13	04	1	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
02	13	04	1	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	50	13	30	30	100	50	93	186
02	13	04	1	01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	30	0	0	0	0	30	30	100
02	13	04	1	01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta kegiatan	40	0	225	225	100	40	265	663
02	13	04	1	01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5	1	22	22	100	5	28	560

02	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																		
02	13	05	1	01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
02	13	05	1	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	13	14	19	19	100	13	46	354									
02	13	05	1	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor pembinaan Pokjanal Posyandu	42	0	14	14	100	42	56	133									
02	13	05	1	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Peserta pelatihan	115	40	118	118	100	115	273	237									
02	13	05	1	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	3	0	1	1	100	1	2	67									

0 2	13	05	1	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dokumen laporan	0	3	1	1	100	0	4	0
0 2	13	05	1	01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	6	40	80	80	100	6	126	2.100
0 2	13	05	1	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang difasilitasi	1.733	1.718	1.718	1.718	100	1.733	5169	298

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Desa mandiri			55	60	65	70	80	194	65	70	
2	Jumlah Desa Berkembang			750	767	797	817	766	704	797	817	
3	Jumlah Desa Tertinggal			300	330	300	270	229	143	300	270	
4	Jumlah Aparatur Desa Terlatih			600	650	1010	1380	650	1.184	1010	1380	
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif			1720	1730	1740	1750	1728	3.686	1740	1750	
6	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang			710	720	730	750	647	642	730	750	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mendukung misi Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan daerah yaitu memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global dengan fokus pada tujuan pertama yaitu Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan Masyarakat, indikator tujuan presentase penduduk miskin dengan Sasaran yaitu Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, dan indikator sasaran Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan Persentase penduduk miskin perkotaan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa isu-isu strategis yaitu Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Optimalisasi Lembaga Desa dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat serta Peningkatan Pemanfaatan Potensi Desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan penyesuaian dengan pagu anggaran definitif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah serta perubahan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan daerah. Perkembangan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

TABEL 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya kinerja pegawai DPMD		16.844.152.395	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya kinerja pegawai DPMD		26.109.444.456	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	20 buku	15.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	20 buku	15.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40 buku	19.326.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40 buku	19.146.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40 buku	21.370.340	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40 buku	37.125.135	
	Koordinasi dan Penyusunan dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 buku	3.435.500	Koordinasi dan Penyusunan dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 buku	10.284.783	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen dan laporan evaluasi	25 buku	576.634.939		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen dan laporan evaluasi	25 buku	8.301.450.079
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	7.649.742.747		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	7.110.571.638
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2500 lembar	14.446.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2500 lembar	34.854.600
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	11.348.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	13.499.985
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester	10 buku	8.559.250		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester	10 buku	9.999.876
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen RKBMD	10 buku	4.574.500		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen RKBMD	10 buku	9.767.099
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Polis Asuransi	1 tahun	20.000.000		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Polis Asuransi	1 tahun	40.000.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan	28 buku	5.955.000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan	28 buku	8.345.148

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas	87 stel	175.425.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas	87 stel	461.867.500
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10 dokumen	8.000.000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10 dokumen	8.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang	110.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang	240.004.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	104.000.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	375.029.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	145.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	250.015.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	70.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	692.325.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	356.835.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	66.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 tahun	66.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 tahun	500.000

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	60 orang	103.538.607		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	60 orang	355.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	Jumlah rapat yang diselenggarakan	80 kali	744.915.295		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	Jumlah rapat yang diselenggarakan	80 kali	744.915.295	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah website	1 domain	50.000.000		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah website	1 domain	1.537.975.078	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan dinas operasional	1 buah	575.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan dinas operasional	1 buah	83.483.393	
		Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	15 buah	400.645.000		Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	15 buah	420.500.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	20 buah	998.500.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	20 buah	687.500.000	
		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung	1 buah	250.000.000		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung	1 buah	600.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	13 buah	449.505.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	13 buah	189.173.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Surat yang disediakan	1.400 surat	7.170.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Surat yang disediakan	1.400 surat	29.120.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	12 rekening	424.155.701		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	12 rekening	849.674.983
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 tahun	1.077.551.300		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 tahun	2.103.430.964
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	26 unit	573.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	26 unit	459.136.400
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20 buah	60.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20 buah	60.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	1.663.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	235.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	80.268.716		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	50.000.000

2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama		333.856.221	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama		481.248.000
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					
		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	100.000.000		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	100.000.000
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa	233.856.221		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa	381.248.000
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik		12.009.779.232	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik		7.847.266.113
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	50 perda/perbup	100.000.000		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	50 perda/perbup	109.200.000
		Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	1432 orang	250.000.000		Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	1432 orang	873.613.000
		Fasilitas Pengelolaan Keuangan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	1432 orang	250.000.000		Fasilitas Pengelolaan Keuangan desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	1432 orang	480.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	150 orang	394.490.400		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	150 orang	585.000.000

		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	25.000.000		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	25.000.000
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	3.157.015.922		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	1.838.303.553
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	150.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	250.000.000
		Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	140 orang	6.372.847.700		Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	140 orang	1.754.231.631
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	135 orang	166.445.000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	135 orang	73.289.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	100 orang	640.460.000		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	100 orang	1.358.628.929
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	20 desa	503.520.210		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	20 desa	500.000.000
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif		14.346.797.368		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif		13.367.428.951

		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	13 kab	6.284.200.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	13 kab	6.751.020.000	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	120 orang	2.274.350.320	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	120 orang	2.324.350.320	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	115 orang	1.234.212.298	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	115 orang	320.175.000	

		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	120 orang	680.000.000		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	120 orang	545.108.000	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	6 kab	874.034.750		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	6 kab	462.775.631	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PKK yang di fasilitasi	1733 Lembaga	3.000.000.000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PKK yang di fasilitasi	1733 Lembaga	3.000.000.000	
JUMLAH						43.534.585.216						47.805.387.520	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa, diikuti dengan rendah dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan aparatur desa dalam pengoperasian Teknologi Informasi, rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai UKM dan kurang optimalnya dukungan desa serta pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa yang masih rendah adalah merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya usulan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan juga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3. Optimalisasi lembaga desa dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
4. Peningkatan pemanfaatan Potensi Desa.

Hal tersebut diatas merupakan tolok ukur juga dalam pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Rancangan Awal RKPD				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya kinerja pegawai DPMD		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	20 buku	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40 buku	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40 buku	
	Koordinasi dan Penyusunan dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 buku	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen dan laporan evaluasi	25 buku	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2500 lembar	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester	10 buku	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen RKBMD	10 buku	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Polis Asuransi	1 tahun	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan	28 buku	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas	87 stel	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10 dokumen	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 tahun	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	60 orang	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	Jumlah rapat yang diselenggarakan	80 kali	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah website	1 domain	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan dinas operasional	1 buah	
		Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	15 buah	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	20 buah	
		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung	1 buah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	13 buah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Surat yang disediakan	1.400 surat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	12 rekening	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 tahun	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	26 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20 buah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	
2		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama		
		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa	
3		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				

		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	50 perda/perbup	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	150 orang	
		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	
		Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	140 orang	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	135 orang	
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	100 orang	
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	20 desa	

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif		
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	13 kab		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	120 orang		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	115 orang		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	120 orang		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	6 kab		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PKK yang di fasilitasi	1733 Lembaga		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari arah kebijakan dan strategi nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka mendukung program prioritas nasional.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan memiliki tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam kurun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Dilihat dari penjabaran kebijakan nasional yang telah dituang dalam rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa arah program dan kegiatannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di pedesaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan intergrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan”.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
3. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah dituangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapainya.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 4 program dengan total kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 54 sub kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

❖ **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

- Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

❖ **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
 - 2) Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 4) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - 5) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - 6) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
 - 8) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
 - 9) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - 10) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
 - 11) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

❖ **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

- Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Table 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
01	00				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kinerja pegawai DPMD			26.109.444.456				31.740.505.326
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.383.756.497				8.383.756.497
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kota Palangka Raya	20 buku	15.750.000			20 buku	15.750.000
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Kota Palangka Raya	40 buku	19.146.500			40 buku	19.146.500
2	13	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	Kota Palangka Raya	40 buku	37.125.135			40 buku	37.125.135

2	13	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Kota Palangka Raya	10 buku	10.284.783			10 buku	10.284.783
2	13	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan evaluasi	Kota Palangka Raya	25 buku	8.301.450.079			25 buku	8.301.450.079
2	13	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.168.926.099				7.168.926.099
2	13	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Palangka Raya	46 orang	7.110.571.638			46 orang	7.110.571.638
2	13	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Kota Palangka Raya	2500 lembar	34.854.600			2500 lembar	34.854.600
2	13	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Palangka Raya	5 buku	13.499.985			5 buku	13.499.985
2	13	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester	Kota Palangka Raya	10 buku	9.999.876			10 buku	9.999.876
2	13	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				58.112.247				58.112.247
2	13	01	1.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	Kota Palangka Raya	10 buku	9.767.099			10 buku	9.767.099
2	13	01	1.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Polis Asuransi	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.000.000			1 tahun	40.000.000
2	13	01	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan	Kota Palangka Raya	28 buku	8.345.148			28 buku	8.345.148

2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.084.900.500				1.084.900.500
2	13	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Palangka Raya	87 stel	461.867.500			87 stel	461.867.500
2	13	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Kepegawaian	Kota Palangka Raya	10 dokumen	8.000.000			10 dokumen	8.000.000
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Kota Palangka Raya	20 orang	240.004.000			20 orang	240.004.000
2	13	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kota Palangka Raya	20 orang	375.029.000			20 orang	375.029.000
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.646.730.373				3.966.015.000
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik	Kota Palangka Raya	10 buah	250.015.000			10 buah	250.015.000
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	6 buah	692.325.000			6 buah	650.000.000
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku dan Fotocopy	Kota Palangka Raya	200 buku	66.000.000			200 buku	66.000.000
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Kota Palangka Raya	1 tahun	500.000			1 tahun	100.000.000
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	Kota Palangka Raya	60 orang	355.000.000			60 orang	500.000.000
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diselenggarakan	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	80 kali	744.915.295			80 kali	800.000.000
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website	Kota Palangka Raya	1 domain	1.537.975.078			1 domain	1.600.000.000

2	13	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.980.656.393				4.800.000.000
2	13	01	1.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Palangka Raya	1 buah	83.483.393			1 buah	2.500.000.000
2	13	01	1.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	Kota Palangka Raya	15 buah	420.500.000			15 buah	500.000.000
2	13	01	1.07	10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palangka Raya	20 buah	687.500.000			20 buah	700.000.000
2	13	01	1.07	10		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang disediakan	Kota Palangka Raya	1 buah	600.000.000			1 buah	750.000.000
2	13	01	1.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	Kota Palangka Raya	13 buah	189.173.000			13 buah	350.000.000
2	13	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.982.225.947				3.378.794.983
2	13	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	Kota Palangka Raya	1.400 surat	29.120.000			1.400 surat	29.120.000
2	13	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	Kota Palangka Raya	12 rekening	849.674.983			12 rekening	849.674.983
2	13	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.103.430.964			1 tahun	2.500.000.000
2	13	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				804.136.400				2.900.000.000

2	13	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Palangka Raya	26 unit	459.136.400			26 unit	500.000.000
2	13	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kota Palangka Raya	20 buah	60.000.000			20 buah	150.000.000
2	13	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palangka Raya	1 gedung	235.000.000			1 gedung	2.000.000.000
2	13	01	1.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palangka Raya	24 unit	50.000.000			24 unit	250.000.000
2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama			481.248.000				650.000.000
2	13	03	1.01			Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				481.248.000				650.000.000
2	13	03	1.01	02		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi	Kota Palangka Raya	5 desa	100.000.000			5 desa	100.000.000
2	13	03	1.01	03		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi	Kota Palangka Raya	8 desa	381.248.000			8 desa	550.000.000
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik			7.847.266.113				9.725.000.000
2	13	04	1.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				7.847.266.113				9.725.000.000

2	13	04	1.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	50 perda/perbup	109.200.000			50 perda/perbup	125.000.000
2	13	04	1.01	02		Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	1432 orang	873.613.000			1432 orang	1.000.000.000
2	13	04	1.01	05		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	1432 orang	480.000.000			1432 orang	750.000.000
2	13	04	1.01	06		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	150 orang	585.000.000			150 orang	600.000.000
2	13	04	1.01	07		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	5 desa	25.000.000			5 desa	150.000.000
2	13	04	1.01	08		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Provinsi Kalimantan Tengah	5 desa	1.838.303.553			5 desa	2.000.000.000
2	13	04	1.01	09		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Provinsi Kalimantan Tengah	5 desa	250.000.000			5 desa	350.000.000
2	13	04	1.01	10		Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	140 orang	1.754.231.631			140 orang	2.500.000.000
2	13	04	1.01	11		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	Provinsi Kalimantan Tengah	135 orang	73.289.000			135 orang	150.000.000

2	13	04	1.01	15		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	100 orang	1.358.628.929			100 orang	1.500.000.000
2	13	04	1.01	16		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	20 desa	500.000.000			20 desa	600.000.000
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif			13.367.428.951				14.200.000.000
2	13	05	1.01			Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				13.367.428.951				14.200.000.000
2	13	05	1.01	02		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	13 kab	6.715.020.000			13 kab	7.000.000.000

2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan							
					(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	Provinsi Kalimantan Tengah	120 orang	2.324.350.320		120 orang	2.500.000.000
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah peserta kegiatan	Palangka Raya	115 orang	320.175.000		115 orang	600.000.000
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta kegiatan	Palangka Raya	120 orang	545.108.000		120 orang	600.000.000
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	6 kab	462.775.631		6 kab	500.000.000
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang di fasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	1733 Lembaga	3.000.000.000		1733 Lembaga	3.000.000.000
JUMLAH									47.805.387.520			56.315.505.326

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 yang didalamnya mengandung strategi dan arah kebijakan serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang dipakai sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 200604 1 010